

Tesa ri Bantaya



GERAKAN PEREMPUAN ADAT
GERAKAN MERAJUT WAKTU

Pengantar Redaksi

Perempuan Pemangku Adat adalah ungkapan yang diberikan Orang Toro kepada perempuan, tidak mengherankan Perempuan dalam struktur sosial memperoleh tempat teratas. Nilai-nilai luhur tersebut nyaris punah dalam keseharian mereka. Sehingga pelaksanaan Semiloka Perempuan Adat Ngata Toro diharapkan dapat menjadi alat perajut kearifan masa silam dengan kondisi kekinian.

Dan kinipun perempuan turut mengambil posisi penting dalam potret sosial kehidupan di luar urusan domestiknya. Empat perempuan petani dapat menjadi salah satu contoh diantaranya. Sekali lagi keempatnya menunjukkan bagaimana sesungguhnya gerakan perempuan.

Kembali berbicara soal gerakan, gerakan masyarakat adat ternyata menjadi perhatian tersendiri bagi lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ragam persoalan masyarakat adat yang menjadi isu global tidak terkecuali problem perpindahan Orang Da'a di Pakava ke Sidondo yang memiliki peta persoalannya tersendiri.

Peta persoalan ternyata masih tak memiliki ujung batas demikian pula deretan angka rupiah yang menjadi beban utang kita dan merupakan warisan terbesar bangsa ini kepada para generasinya.



Redaksi Menerima Tulisan berupa Opini, Artikel dan Berita dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Tulisan diketik atau ditulis diatas kertas folio/HVS
2. Jarak Tulisan 1 spasi
3. Tulisan minimal 3 lembar folio.
4. Penulis harus mencantumkan identitas lengkap

Redaksi menerima kritik dan saran dalam bentuk tulisan demi perbaikan terbitan ini. Setiap kritik dan saran yang disampaikan hendaknya mencantumkan identitas lengkap.

Daftar Isi

- 2 Pengantar Redaksi
- 3 Kearifan Masa Silam Masyarakat Adat Toro Terhadap Perempuan
- 5 Gerakan Perempuan Adat NgataToro Gerakan Merajut Waktu
- 6 Gunjang-Ganjing Pelantikan Camat Kulawi
- 7 Menengok To Pakava di Sidondo
- 9 Republik Indonesia Diam - Diam Bayar Ganti Rugi 600 Juta Gulden ke Belanda
- 10 Belajar Dari Perempuan Petani
- 14 Globalisasi dan Nasib Masyarakat Adat
- 15 Petani Korban Banjir duduki Tanah Eks. Konsesi Babia

Tesa ri Bantaya, di terbitkan oleh Yayasan Bantuan Hukum Bantaya Palu sebagai Media Informasi Petani dan Masyarakat Adat.

Tim Redaksi :

Dewi Rana (Penanggung jawab),
Niar (Koord),
Shape, Livia Nur, Ewin, Vince,
Asmawin, Ahmuddin,
Safei, Ifan,
Ijal (Tata Letak)

Alamat Redaksi :

Jl. Beringin I No. 10 Palu-Sulawesi
Tengah.
Telp/Fax. 0451-411676.
E-mail :
bantaya@palu.wasantara.net.id

Gambar Sampul Depan :

Perempuan Seko Dan Anak
(Foto. Dok. Awam Green & Bantaya)

KEARIFAN MASA SILAM MASYARAKAT ADAT TORO TERHADAP PEREMPUAN

Tulisan ini merupakan rangkuman dua buah karya tulis Rukmini Rizal Aktivis Perempuan Adat Ngata Toro serta hasil wawancaranya bersama Budi dari Yayasan Tadulakota dengan Almarhum Tohola Palembang

Masyarakat adat telah menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan oleh kebijakan pembangunan selama tiga dekade terakhir. Walaupun masyarakat adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara Indonesia akan tetapi keberadaannya belum memperoleh porsi perhatian yang sewajarnya. Bahkan cenderung secara sistematis disingkirkan dari agenda politik nasional.

Sistem kebijakan politik yang top down (dari pusat ke daerah-daerah ba-wahan) berakibat kondisi demikian menjalar hingga ke ruang lingkup kewilayahan yang lebih kecil atau struktur pemerintahan sederhana, semisal desa atau ngata di Kecamatan Kulawi.

Pengejawantahan lainnya terlihat dengan kehadiran institusi bernama Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) di setiap desa yang hanya melemahkan posisi tawar perempuan. Di mana urusan domestik (kerumahtanggaan) menjadi jabatan wajib perempuan dalam kesehariannya.

Melihat sistem tersebut nilai-nilai kearifan lokal yang nyaris terkubur dengan kebijakan nasional tentang perempuan dapat dijadikan bahan rujukan untuk mengangkat kembali posisi perempuan. Tulisan ini menelusuri konsep Masa Silam Masyarakat Adat Toro di Kecamatan Kulawi tentang perempuan.

Konsep Tina Ngata

Jika bangsa ini baru memiliki pemimpin perempuan pada awal abad ke-XXI, maka Orang Toro justru sudah memilikinya sejak tujuh abad silam tepatnya ke-XVIII. Menurut penuturan para *Totua Ngata Toro* (Dewan Pimpinan Kampung) bahwa sejak saat itu mereka telah memiliki seorang figur pemimpin perempuan yang fungsinya sama dengan *Totua Ngata*. Seorang perempuan

yang memangku jabatan tersebut diberi gelar *Tina Ngata* (Ibu Kampung). Ke-beradaan Tina Ngata sendiri tidak saja dihormati oleh warga ngata tetapi juga ngata yang berada di sekitarnya (*Tongki Ngata*).

Sosok *Tina Ngata* yang cukup populer hingga kini bahkan sangat disegani Kompeni Belanda sekalipun adalah *Hangkalea*. Konsep kesetaraan lokal ini ternyata mampu membendung langkah kaki kaum penjajah. Persatuan dan Kesatuan (*Hintuvu*) antara rakyat, *Totua Ngata* dan *Tina Ngata* serta kearifan para pemimpin kala itu yang sangat memperhatikan kepentingan rakyat merupakan senjata terampuh dalam melakukan perlawanan.

Selain *Hangkalea* masih ada beberapa *Tina Ngata* lainnya, seperti *Lingkumene*, *Tobanawa*, dan *Ngkamumu*. Kehadiran seorang *Tina Ngata* dalam setiap musyawarah dan atau pertemuan merupakan sebuah keharusan. Ketidakhadirannya dapat berakibat tidak diakuinya keputusan yang dilahirkan. Bentuk pertemuan demikian yang mewajibkan kehadiran seluruh unsur ngata tanpa terkecuali di sebut *Hintuvu Libu Ngata*.

Fungsi seorang *Tina Ngata* dalam kesehariannya selain telah disebutkan di atas, juga menyelesaikan segala bentuk persoalan baik bersifat internal (dalam ngata) maupun eksternal (luar ngata). Dan dilaksanakan secara bersama dengan para *Totua Ngata*. Jika konflik yang timbul tidak dapat diselesaikan secara internal ngata, maka kehadiran para *Tina Ngata* dan *Totua Ngata* yang berasal dari *Tongki Ngata* sangat dibutuhkan.

Perempuan Adalah Adat

Selain kehadirannya sebagai *Tina Ngata*, perempuan dalam konsep Masyarakat Adat Toro juga memiliki peran penting sebagai *Tua Tambi* (tempat pe-nyimpan adat).



IBU DAN ANAK. Dua sosok yang kerap terlupakan dalam keseharian. (Foto. Dok. Bantaya)

Konsep *Tua Tambi* tercermin dalam berbagai kebiasaan setempat.

Kenyataan tersebut dapat dijumpai pada sistem perdagangan, seseorang tidak dapat menjual barang, semisal hewan ternak manakala pelaksanaannya tidak melibatkan anggota perempuan dalam suatu keluarga. Ragam aktivitas kehidupan Orang Toro di masa silam mengedepankan perempuan didalamnya baik secara kuantitas-kehadiran perempuan-maupun kualitas (saran pemikirannya).

Bentuk kehadiran perempuan dalam konsep ritual dapat ditemui dalam upacara kematian. Para pemain suling atau *Tulali Bola* tidak saja kaum pria tetapi juga melibatkan perempuan didalamnya.

Apabila ada anggota masyarakat yang tidak mengindahkan keberadaan perempuan dalam struktur sosial kemasyarakatan (*Konsep Tua Tambi*), wajiblah ia men-

dapatkan sanksi adat. Jadi jika seorang pria mengetahui bahwa untuk menjual hewan ternak memerlukan izin dari perempuan sebagai *Tua Tambi* dan tidak diindahkannya. Perbuatan demikian tergolong pelanggaran adat serta wajib dikenai sanksi.

Penempatan perempuan yang demikian luhur dalam struktur sosial kemasyarakatan Orang Toro kini mulai menipis. Seiring dengan kehadiran sistem kebijakan nasional (baca: top down) yang pada dasarnya tidak berpihak kepada masyarakat adat khususnya perempuan. Sehingga semakin mengetepikan posisi perempuan.

Kekritisan yang terjadi mampu menggerakkan nurani dan pemikiran Orang-orang Toro untuk secara perlahan menempatkan kembali posisi sosial berdasarkan kearifan masa silam.

Gerakan Perempuan Adat Ngata Toro Gerakan Merajut Waktu

Nilai-Nilai Kearifan Orang Toro Yang Menempatkan Perempuan Dalam Struktur Teratas Tetapi Mengapa Semiloka Perempuan Masih Harus Diselenggarakan

Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT) di penghujung Juni (24-26/03) kembali mengadakan hajatan. Kali ini Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Perempuan Adat Ngata Toro menjadi tema sentral kegiatan. Peserta tidak saja berasal dari warga ngata melainkan pula telah melibatkan beberapa ngata lain, diantaranya Mataue, Bolapapu dan O'o Parese (Dusun Marena). Hari pertama kegiatan (Rabu-red) dipenuhi dengan deretan ceramah dari sejumlah narasumber, diantaranya Balai Taman Nasional Lore-Lindu (BTNLL), Soraya Sultan wakil dari Aktivis Perempuan dan dari tuan rumah sendiri (baca : OPANT). Ceramah di hari pertama sempat memanaskan dengan munculnya pertanyaan tentang peranan agama terhadap gerakan perempuan.

Debat segitiga terjadi antara Yusuf (penanya-red), Kepala Desa Bolapapu dan Soraya Sultan dalam membahas pertanyaan tadi. Untunglah suasana yang mulai memanaskan segera di tengahi secara arif oleh Pendeta Ferdi Lumba. Sehingga suasana dialog yang nyaris menyerempet isu SARA tersebut segera mereda. Kehadiran lembaga perempuan milik negara (baca : PKK) pun menjadi perdebatan

tersendiri. Sejumlah peserta secara berani mengutarakan kekecewaannya terhadap peran PKK didesanya. Sementara ada pula yang merasa lembaga ini masih perlu dipertahankan keberadaannya, namun

dengan merubah aktivitasnya. Konsep pemikiran tadi selanjutnya menelurkan istilah 'PKK Gaya Baru'. Pola pemikiran demikian ternyata bukanlah hal yang mengejutkan bagi seorang Peneliti Sosiologi Institut Pertanian Bogor, Pak Bowo (nama asli ?), menurutnya latar belakang sosial mereka (para pendukung PKK Gaya Baru-red) yang kebanyakan pegawai negeri menjadi ketakutan tersendiri jika harus melawan pemerintah. Jadi jika menghendaki perubahan tentunya secara perlahan. Sementara pada satu kesempatan khusus, Rukmini Rizal selaku Penanggung Jawab Kegiatan menjelaskan bahwa dari

semiloka ini diharapkan dapat menghubungkan nilai-nilai kearifan masa silam Orang Toro tentang perempuan dengan kondisi masa kini.

Dimana nilai-nilai itu nyaris punah dengan kehadiran ragam produk kebijakan negara yang justru menepikan gerakan perempuan. (****)



Semi Loka. Foto bersama antara panitia dan peserta diakhir kegiatan Semiloka Perempuan Adat Ngata Toro yang disponsori oleh The Asia Foundation. (Foto. Dok. Bantaya)

GUNJANG - GANJING PELANTIKAN CAMAT KULAWI

*Orang Kulawi makin kritis
Calon Camat sebagian kritisnya
Dan Bupati pun terpaksa minta izin untuk melantik*

Sebuah sejarah politik di negeri ini telah tergurat di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, untuk pertama kalinya pengangkatan camat mendapat sambutan unjuk rasa dari warganya, tidak ketinggalan para pemuka masyarakat.

Dua hari sebelum pelantikan para Tokoh Masyarakat Adat Kulawi telah menghadap Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala, H.Nabi Bidja, S.Sos di Kediaman Resminya Jalan Di Ponegoro, Palu. Pertemuan itu membicarakan hasrat hati warga Kulawi mengenai calon pemimpin mereka (camat-red). Yang tidak setuju dengan calon dari pemerintah karena telah memiliki calon sendiri. Keinginan warga rupanya bertepuk sebelah tangan alasan Bupati saat itu bahwa jabatan Camat bukanlah jabatan politis sebagaimana walikota maupun Bupati. Serta yang terpenting Surat Pengangkatan pun sudah ditanda-tangani.

Walhasil keputusan yang berjumlah sekitar lima belas orang pulang dengan tangan hampa. Akan tetapi sejumlah Tokoh Pemuda Kulawi rupanya tidak mau menerima begitu saja hasil tersebut. Dengan semangat memperjuangkan tanah untuk masa depan tanah Adat Kulawi Masyarakat yang terdiri dari beberapa kalangan masyarakat melakukan Skenario baru dengan mengadakan aksi boikot berupa penghadangan rombongan bupati yang akan melantik sang camat.

Mengapa mereka bersikeras untuk turut serta memilih Camat ?, Menurut

pengakuan beberapa tokoh masyarakat dan pemuda di Kulawi, mereka sesungguhnya memahami bahwa penentuan pejabat camat adalah otoritas Bupati, namun dari sudut pandang mereka jabatan Camat setingkat dengan posisi "Magau" dalam struktur pemerintahan kulawi pada masa lalu, dan Orang Kulawi punya mekanisme sendiri

dalam menen-tukan siapa Magau yang akan menjadi pemimpin mereka. Hal inilah yang tidak di adaptasi oleh sistem politik dan pemerintahan di Indonesia yang sudah terpatron sedemikian rupa.

Akibatnya rombongan bupati ter-tahan untuk memasuki Desa Bolapapu, Ibukota kecamatan dan pelantikan pun menjadi tertunda. Aksi tandingan pun terjadi masyarakat yang mendukung camat baru melakukan kampanye dengan menggunakan sepeda motor yang berkeliling-keliling di di depan kantor tempat

dila-kukanya pertemuan. Hasilnya terjadi dialog ke dua antara para pengunjuk rasa dengan rombongan bupati. Pertemuan ini selanjutnya menghasilkan kesepakatan, bahwa camat baru Kulawi dapat dilantik dengan syarat bahwa dalam masa jabatannya sebagai camat Kulawi dapat mengetahui sejarah dan perkembangan Adat Kulawi, dan apabila dalam masa jabatannya camat kulawi tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya masyarakat Adat Kulawi akan turun tangan untuk menindaklanjutinya.

Pelantikan baru berlangsung saat bupati meminta izin dari para tokoh masyarakat adat setempat. (***)



MENENGOK TO PAKAVA DI SIDONDO

Siapa sangka To Pakava dapat juga ditemui sekitar Sidondo. Bagaimanakah kisah keberadaan mereka di sana berikut rutinitas – bagaimana kehidupan mereka saat jauh dari kampung halaman - kesehariannya, dituturkan oleh R.Oyong dan Budi, dua aktivis LPA AWAM GREEN

Desa Sidondo, Kecamatan. Sigi biromaru, Kabupaten. Donggala, berjarak sekitar sekitar 23 km dari kota Palu. Desa ini didiami sekitar 1193 KK, terdiri dari berbagai suku, seperti Jawa, Bugis, Minahasa, Kulawi dan Kaili, merupakan penduduk asli desa.

Wilayah desa Sidondo di apit oleh desa Bora dan Maranatha di bagian utara, desa Sibovi di bagian selatan serta Baku bakulu dan Sungai Palu di bagian timur dan baratnya. di ujung timur desa Sidondo terdapat sebuah tempat yang oleh penduduk setempat disebut Tandau. Tempat inilah didiami To Pakava. Secara administratif (pemerintahan desa-red) Tandau termasuk dalam dusun VI Desa Sidondo. Ditengah-tengah dusun ini terdapat saluran Irigasi Gumbasa yang mengalir ke utara, membelah Tandau menjadi dua. Airnya berwarna hijau kecoklatan dengan air itulah masyarakat memenuhi sebagian kebutuhannya seperti mandi dan mencuci serta sesekali juga untuk minum.

Jumlah mereka (baca: To Pakavared) tidak lebih dari 50 kepala keluarga, dan tinggal didalam rumah-rumah berdinding papan dengan atap rumbia dan berlantai tanah. Beberapa rumah berbentuk panggung dengan tinggi bangunan sekitar satu sampai dua meter dari atas tanah, dengan bilah-bilah papan sebagai lantainya, Ukuran luas bervariasi, kebanyakan 6 meter persegi dibagi dalam dua atau tiga ruangan. Untuk tamu, kamar tidur dan Dapur.



RUMAH ASLI. Tempat tinggal To Da'a yang memiliki tinggi ± 20 m dari permukaan tanah. (Foto. Dok. Bantaya)

Ada juga rumah yang dibangun diatas pohon, sekitar lima buah, ada yang tingginya mencapai 20 meter dari atas tanah.

Gelombang Perpindahan

Sejak tahun 1998, Tandau menjadi pusat pemukiman To Pakava, ini adalah perkampungan ketiga mereka di wilayah Sidondo. Ada dua tempat lain yang sebelumnya pernah menjadi lokasi bermukim orang Pakava. yang datang dalam dua gelombang migrasi antara tahun 60 sampai 70-an, yaitu Uwe Lowe dan Sidondo Barat, berdekatan dengan desa Maranatha.

Gelombang migrasi pertama berlangsung sekitar tahun 1965, merupakan migrasi spontan yang di lalukan 15 Kepala Keluarga di pimpin oleh Bapak. Laemanu yang sekarang menjadi ketua adat di Tandau. Kelompok ini pertama kali membuka pemukiman di Uwe Lowe, yang terletak sekitar 10 Km dari pusat desa Sidondo. Menurut Bapak. Laemanu, mereka berasal dari desa Palentuma yang terletak di pegunungan sebelah barat Lembah Palu, di kecamatan Marawola (sekarang Kecamatan Rio Pakava), Ia bersama rombongan waktu itu bermaksud untuk mendekatkan diri dengan kota, karena di kota mereka merasa akan lebih mudah untuk menjual kelebihan panen atau hasil hutan. Namun setibanya disini mereka baru mengetahui bahwa keadaan alam utamanya hutan di Pakava jauh berbeda dengan yang ada di sekitar Sidondo. Hutan disini tanahnya agak kering dan berbatu,

kurang hujan, dengan pohon – pohon yang hampir seragam jenis-nya. Dengan ukuran-ukuran batang yang kecil, serta tidak banyaknya jenis pohon yang menghasilkan buah, sebagaimana hutan mereka di Pa-kava, di mana ter-dapat pohon sagu dan durian. Di kala musim paceklik dapat dijadikan cadangan pangan.

Tahun 1971, terjadi migrasi gelombang ke dua orang Pakava dari Valintuma bersama dengan masyarakat dari Gimpu Bia dan Tomodo yang juga Kecamatan Marawola. Pemerintah selanjutnya menurunkan mereka ke sebelah barat Sidondo. Jumlah mereka sekitar 70 Kepala Keluarga dan ditempatkan dalam sebuah kompleks perumahan transmigrasi.

Berakhir Di Tandau

Pada tahun 1983 karena tidak tahan dengan musim panas berkepanjangan dan gagal dalam menggarap tanah untuk sawah, sekitar 25 kepala keluarga To Pakava yang berasal dari Valintuma memutuskan untuk meninggalkan tanah dan rumah dikomplek Transmigrasi. Untuk pergi menggabungkan diri di Uwe Lowe yang berjarak sekitar 10 Km dari kompleks tersebut.

Uwe Lowe selain masih di kelilingi Hutan, juga memiliki topografi (bentuk permukaan bumi-red) yang bergelombang atau berbukit-bukit, sehingga cocok bagi pengembangan sistem perladangan yang menjadi keahlian orang Pakava.

Pada tahun 1998, mereka diminta untuk turun ke desa, tepatnya di Tandau dengan dalih bahwa ladang yang mereka kelola sebagian besar termasuk Kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Sehingga keberadaannya dituduh mengancam kelestarian Kawasan TNLL. Walhasil, ketiga kalinya mereka harus membangun pemukiman kali ini di Tandau termasuk dalam wilayah Desa Sidondo I.

Tak Putus Dirudung Malang

Di kampung yang baru (Tandau-red) tidak seorang pun To Pakava yang memiliki lahan persawahan. Meskipun dikelilingi oleh berhektar-hektar luas areal persawahan. Umumnya dikuasai para pejabat pemerintah dan militer dari Palu. Mereka hanya hidup sebagai buruh tani, untuk itupun jarang pemilik sawah yang mau meng-gunakan tenaga mereka. Karena kerap kali kalah bersaing dengan buruh tani dari dusun lain yang memang lebih terampil dan berpengalaman menggarap sawah. Se-bagai gantinya mereka menjual tenaga kepada bos –



MIGRAN. Rumah To Da'a di Daerah yang baru.
(Foto. Dok. Awam Green)

bos rotan.

Sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun, antara 20 sampai 30 laki-laki Tandau di angkut dengan trek, lalu di bawa ke hutan-hutan di wilayah desa Saluki, Tuva bahkan Toviaora untuk mengumpulkan rotan disana. Lazimnya mereka memperoleh panjar sebesar Rp.100.000 sampai 200.000 per orang. Sementara jumlah penghasilan perbulannya bagi seorang pengambil rotan tidaklah menentu. Semua itu bergantung kepada berapa kali seorang pengumpul datang untuk menimbang rotan, terkadang penimbangan hanya berlangsung seminggu sekali atau lebih. Yang akan segera habis untuk membeli bekal di hutan dan sedikit pesangon bagi keluarga di rumah. Dengan uang sejumlah itu, bekal yang terbeli tentulah tidak banyak, paling cukup untuk satu atau dua minggu, padahal mereka harus menghabiskan waktu berminggu-minggu di dalam hutan. Untuk memperoleh bekal lagi mereka harus minta tambahan uang guna membeli beras, ikan garam dan rokok, yang sudah di siapkan majikannya. Tentunya dengan harga yang jauh lebih mahal. Dan tidak ada pilihan tempat-maklum hutan. Harga pembelian (ambil dulu bayarnya nanti-red) biasa di potong dari hasil penimbangan rotan dan kerap kali tidak sebanding dengan besarnya pengambilan tadi (utang-red).

Pada saat bersamaan para ibu dan perempuan lainnya mau tak mau harus berinisiatif mencari tambahan penghasilan. Bila bertepatan dengan musim panen, mereka akan mengumpulkan bulir demi bulir padi yang luruh ketanah pada saat dituai (posangki) atau pada waktu orang membanting, kemudian di jemur dan di tumbuk menjadi beras. Dan itulah yang akan dijadikan sebagai tambahan persediaan pangan di dalam rumah. (*/*)

Republik Indonesia Diam-diam Bayar Ganti Rugi 600 Juta Gulden ke Belanda

Tanpa banyak diketahui publik, penghisapan Belanda terhadap Indonesia ternyata terus berlangsung. Secara diam-diam, Indonesia malah membayar beban ganti rugi kepada Belanda sejak negeri itu hengkang dari republik. Beban itu baru terlunasi tahun 2003 ini. Konstruksi pihak terjajah wajib membayar ganti-rugi kepada pihak penjajah, itu terkuak setelah sertifikat dana Claimindo dan Belindo di tutup di bursa efek AEX Amsterdam per tanggal 17 Maret 2003, dalam artian kewajiban Indonesia membayar ganti rugi telah lunas. Rupanya melalui pendanaan Claimindo dan Belindo itulah arus uang pembayaran dari Indonesia dikelola dan disalurkan kepada para pihak di Belanda dalam bentuk sertifikat dana reksa atau efek.

Seorang diplomat senior mengungkapkan kepada detickom bahwa beban ganti rugi yang harus ditanggung Indonesia itu tepatnya dikaitkan dengan keputusan Presiden Soekarno menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 1956. Ketika itu semua jenis perusahaan Belanda, dari manufaktur sampai perkebunan tanpa kecuali, di ambil alih menjadi milik Indonesia. Sebuah langkah politik Soekarno yang berani dan dalam sekejap memberi modal awal bagi republik yang baru lahir. Namun masa manis mengalirnya pundi-pundi uang ke kas republik yang dihasilkan perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi itu hanya bertahan 13 tahun. Setelah Soekarno dijatuhkan dan rezim orde baru Soeharto naik, keadaan jadi berbalik. Pemerintah Soeharto tidak berdaya menghadapi Belanda dan bertekuk lutut memenuhi klaim negeri bekas penjajah itu agar membayar ganti-rugi. Besarnya klaim ganti rugi yang harus dibayar Indonesia mencapai 600 juta gulden, suatu jumlah yang luar biasa besar untuk kurs masa itu. Perjanjian sanggup membayar ganti rugi atas perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan itu diteken pada tahun 1969. Pihak pemerintah Indonesia diwakili Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Karena jumlah ganti-rugi untuk ukuran saat itu sangat besar, Indonesia hanya menyanggupi membayar dalam jangka waktu 35 tahun. Sejarawan pun tak tahu adanya perjanjian pelunasan ganti rugi tersebut. Maka itu pemerintah diminta memberikan penjelasan.

Tak Tahu

Sejarawan dan Peneliti Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Asvi Warman mengaku tak tahu adanya perjanjian yang mewajibkan Indonesia menyetor 600 juta gulden ke Belanda. Setahu Asvi, Indonesia memang pernah terkena kasus kewajiban membayar Belanda sebesar 4,5 miliar gulden terkait Konferensi Meja Bundar (KMB). Namun untuk kasus itu Indonesia berhasil membatalkan kewajiban membayar. "Saya tak tahu kalau tahun 1969 kasus itu terulang. Saya sungguh tak mengetahui kalau ada data



perjanjian lain. Ini sangat menarik,"kata Asvi.

Asvi juga merasa aneh jika Indonesia yang pernah di jajah Belanda justru bersedia membayar ganti rugi tersebut. " Meskipun Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tapi tahun 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan Belanda artinya Indonesia sudah diakui kemerdekaannya oleh Belanda,"kata Asvi. Untuk kejelasan kasus setoran itu, menurut Asvi pemerintah terutama menteri terkait harus memberikan klarifikasi kepada masyarakat.

Rp 1,4 Miliar Gulden

Selain kewajiban 600 juta gulden, ternyata pada tahun 1949-an, Belanda telah sukses memeras Indonesia dengan kewajiban setor mencapai 4,5 miliar gulden ! Kisah ini bermula dari Konferensi Meja Bundar (KMB), yang memutuskan sebagai imbalan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, Belanda mendapat bayaran sejumlah 4,5 miliar gulden dari pihak Indonesia. Harian Kompas pada Agustus 2000 lalu pernah menulis bahwa lewat tulisannya di De Groene Amsterdammer Januari 2000 berjudul De Indonesische Injectie (Sumbangan Indonesia), sejarawan Lambert Giebels mengungkapkan, sebelumnya Belanda menuntut jumlah lebih banyak, yakni 6,5 miliar gulden.

Dari mana angka itu diperoleh ? Katanya, itulah total utang Hindia Belanda kepada Pemerintah Belanda yang berkedudukan di Den-Haag. Itu berarti, uang yang dikeluarkan Belanda untuk menindas Indonesia, khususnya dua kali agresi militer, justru harus dibayar oleh pemerintah baru Republik Indonesia. Namun, perjanjian KMB itu kini telah dibatalkan Indonesia secara sepihak karena menilai persetujuan itu berat sebelah. Meskipun demikian, Indonesia sudah terlanjur setor 4 miliar Gulden selama 1950-1956 ! duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Abdul Irsan pada 24 Agustus 2001 pada Radio Nederland menyentil hal itu. Dia mengungkapkan, barangkali kesepakatan itu diteken karena para perunding itu dingin cepat-cepat supaya Indonesia diakui. Tapi, mengapa hal ini tidak tertoreh di buku sejarah ? (*Sumber : Milis Nasional*)

Belajar dari Perempuan Petani

*Perempuan-perempuan yang berbalurkan lumpur sawah ...
Perempuan-perempuan yang berwangikan asap dapur...
Perempuan-perempuan yang berijazahkan sekolah alam ...*

Te sa'ri Bantaya secara khusus menampilkan profil perempuan-perempuan yang gigih melakukan perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan. Tidak saja persoalan perempuan tetapi juga kemasyarakatan lainnya, semisal konflik tanah. Dengan harapan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Karena kerja yang mereka lakukan bukan sekedar kerja "bibir" belaka alias diskusi tetapi kerja yang menguras isi kepala, otot dan bahkan nyawa taruhannya.

Kalau Ngana Menyerah Torang Cerai Saja

**Yuritje Lapastara
(40 th)**



Kalimat itu terlontar dari bibir mungil Yuritje Lapastara, perempuan kelahiran Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, Kabupaten Luwuk Banggai 26 Juli 1962, saat menemani sang suami

Yaris Djaman ke Kantor Polisi Sektor (Polsek) Bunta. Untuk menjalani pemeriksaan kasus Tanah eks. onderneming di Bohotokong. Dan ternyata mampu memecut semangat Yaris untuk tetap bertahan.

Keberanian Yuritje dilatarbelakangi dengan kemandirian yang dimilikinya sejak usia muda. Sifat tidak bergantung dengan orang lain terlebih terhadap lawan jenis (baca;pria) membuatnya tidak gentar dalam mengarungi kehidupan.

"Sejak kecil saya sudah membantu orang tua mencari uang. Maklum saja saya ini bersaudara delapan orang, saudara laki-laki hanya dua orang itu pun masih kecil-kecil. Apalagi bapak saya secara fisik tidak terlalu sehat. Jadi terpaksa saya bersama beberapa orang saudara perempuan lain harus membantu di kebun. Serta ba'sube (membersihkan rumput-red) di sawahnya

orang,"tuturnya dalam deretan bahasa sederhana.

Karena alasan ekonomi pula perempuan berkulit sawo matang ini harus rela meninggalkan bangku sekolah dasar hingga kelas III. Sejurus kemudian ia menambahkan seandainya waktu dapat dikembalikan, maka ia ingin mengenyam bangku pendidikan formil hingga jenjang yang tertinggi. Seterusnya bekerja untuk rakyat.

Saat ditanyakan mengapa ia begitu gigih memperjuangkan hak-hak petani dalam mengelola tanah eks onderneming sebagai lahan pertanian. Ibu dari Abdul Syarif (9 th), menjawab singkat bahwa banyak petani di Bohotokong tidak memiliki tanah, sedangkan pada saat bersamaan ratusan hektar tanah (eks enderneming-red) ditelantarkan. Selanjutnya ia menyebut sebuah Keppres yang mengatur tentang pengelolaan eks onderneming, sebagai dasar hukum aksi mereka.

Berangkat dengan sebuah pemikiran sederhana perempuan yang ketika masih lajang sanggup memanjat pohon kelapa, menjadi sanggup pula berhadapan langsung dengan aparat keamanan. Keberanian tersebut teruji saat delapan puluh orang perempuan petani Bohotokong berunjuk rasa ke Kantor Polsek Bunta.

Mereka yang dalam keseharian hanya bergelut tanah dan aroma asap dapur ini dengan gagah berjalan kaki dari Bohotokong menuju Bunta. Bermodalkan beberapa lembar pamflet serta menggunakan daster dengan wajah dilumuri bedak dingin. Tak ketinggalan toru (penutup kepala tradisional-red) sebagai pelindung dari sengatan matahari. Selanjutnya Yuritje mengatakan, "Kalau selama ini kami takut pada aparat. Tetapi entah sejak perjuangan tanah eks onderneming, terlebih siang itu saya seperti memiliki keberanian lebih. Saya sampai berteriak-teriak histeris di depan Kapolsek-sembari memperagakan gayanya menghadapi orang nomor satu di jajaran kepolisian Bunta".

Gerakan Perempuan = Gerakan Ekonomi



Ramlah (41 th)

Sosok Ramlah yang kini telah menjadi ibu dari seorang putri, Munifah (8 bulan) ternyata tetap tidak berubah. Meskipun nyaris tiga tahun ia tidak lagi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan bersama YBH BANTAYA. Dan lebih menyibukkan dirinya dengan mengurus rumah tangga. Serta sesekali membantu sang suami, Kalimin, menambah kepulan asap dapur dengan berdagang di sekitar Ngovi.

Sembari menggendong Nifah panggilan akrab Munifah-Ramlah menceritakan awal mula keterlibatannya dengan mahluk bernama lembaga swadaya masyarakat (LSM-red). "Saya ini mulanya seorang pekerja sosial masyarakat (PSM-red) yang bertugas di sekitar wilayah Kecamatan Marawola. Dan itu mulai saya tekuni sejak tahun 1985," tuturnya dengan sesekali mengajak si kecil bercakap-cakap.

Sesaat kemudian ia menambahkan, "Anehnya sudah saya ini orang tukang melawan di Porame (desa-red) tetapi justru saya terpilih menjadi PSM Teladan Se-Sulteng tahun 1987. Dan terbaik II tingkat Nasional di tahun yang sama".

Meskipun bekerja sebagai PSM berarti bekerja untuk pemerintah-karena PSM berada dalam lingkup Departemen Sosial-tidak berarti Ramlah menjadi anak yang manis. Keberaniannya membela kebenaran ternyata tidak serta merta hilang. Terbukti dengan tindakan menolak bantuan Kambing yang berasal dari Depsos (instansi yang membawahnya langsung-red). Alasannya menolak karena ukuran kambing yang diberikan tidak sesuai dengan seperti apa yang dijanjikan. "Masa anak kambing yang dorang kasih ke kita," gerutunya sambil menggambarkan ukuran anak kambing yang di beri saat itu.

Bermodalkan kemampuan sebagai PSM handal, perempuan berpostur semampai ini ternyata diminati oleh Yayasan

Merah Putih Palu (YMPP-red), melalui Program Pemanfaatan Pekarangan Dengan Tanaman Produktif. Ia kontrak YMPP selama setahun. Untuk seterusnya mulai aktif terlibat dengan kegiatan-kegiatan diskusi yang diselenggarakan secara berkala. Pelan namun pasti pengetahuannya mulai bertambah.

Memasuki tahun ke dua kemesraannya dengan LSM (1993-red), ia secara tidak sengaja berkenalan dengan Efendi Kindangen (Salah seorang pendiri Yayasan Tanah Merdeka dan eks aktivis senior YBH BANTAYA-red). Oleh Fendi-sapaan akrab Efendi Kindangen-Ramlah di perkenalkan dengan rekan-rekan di Yayasan Tanah Merdeka (YTM-red). Selanjutnya dipromosikan sebagai Community Organizer-pengorganisir masyarakat-(CO-red) di Povelua menggantikan Erna. "Tetapi saya belum langsung mengiyakan. Takut tidak mampu mengerjakan tugas itu,"katanya merendah. Dari seorang CO di Povelua inilah prestasi Perempuan To Da'a ini terus menanjak.

Sekian puluh kasus yang ditanganinya baik saat bergabung dengan YTM maupun dengan YBH BANTAYA, ternyata persoalan Uwe Lera-konflik penguasaan sumber mata air secara sepihak oleh PDAM DONGGALA di Desa Porame-merupakan kasus terbilang istimewa baginya. Karena menurutnya kasus ini terjadi saat rezim Soeharto masih berkuasa. Rezim di mana orang masih takut untuk mengeluarkan pendapat. Terlebih melakukan perlawanan terhadap segala tindakan pemerintah. "Heh... baru kali ini saya lihat ibu-ibu berani melawan pemerintah. Sudah tidak ada rasa takut. Sampai menangis-menangis melawan PDAM. Saya sampai heran ba'liat keberanian mereka," kenang Ramlah dengan nada kagum. Saat ditanyakan bagaimana seharusnya gerakan perempuan, secara spontan meluncurlah jawaban bahwa gerakan perempuan idealnya berpijak pada pemberdayaan ekonomi. "Pemberdayaan ekonomi di sini adalah bahwa bagaimana perempuan mengambil kembali pekerjaan mereka yang kini telah diambil alih laki-laki. Misalnya menuai padi pakai anai-anai, sekarang sudah pakai mesin yang dikerjakan oleh laki-laki. Trus, untuk pekerjaan tertentu

yang dianggap pekerjaan perempuan seperti mencuci piring, lantas setelah memiliki nilai ekonomi justru dikuasai pria. Coba lihat di setiap rumah makan atau Warung Mas Joko yang lagi banjir itu, siapa tukang cuci piringnya? Tapi coba suruh laki-laki cuci piring di rumah mana mau dia," jelas Ramlah.

Le Naeka Yaku nte Pulisi*



Hamuria (74 th)

Nyaris dua puluh sembilan tahun waktu yang harus dihabiskan Ibu Hamuria, ibu dari empat orang putri, dalam memperjuangkan haknya atas tanah seluas 1 hektoare atau sekitar 12 petak.

Kisah nenek dua puluh orang cucu berawal dari dipatoknya lahan persawahan milik keluarga oleh oknum badan pertanahan-kala itu di sebut Agraria. Dalam bahasa Kaili Ledo, Nenek Hamuria mulai mengisahkan perjalanan panjangnya dalam mencari keadilan.

Di tahun 1974 saat tanah persawahan milik Keluarga Yojo Tonggu (orang tua Nenek Hamuria) dikelola putra-puterinya mulai menguning, mendadak beberapa orang oknum agraria dan instansi terkait lainnya memasang patok. Tindakan tersebut cukup mengejutkan nenek yang berperawakan mungil. Merasa tidak pernah menyerahkan apalagi menjual tanah ia bersama ke tiga saudaranya lantas mengusir orang-orang tadi.

Seusai peristiwa pengusiran beberapa hari kemudian mereka lantas dipanggil ke Kantor Desa Nunu (saat itu belum menjadi kelurahan-red). Ternyata di tempat itu mereka diserahi uang sebesar Rp. 700.000,00. Sebagai harga dari tanah seluas 1 ha. Jadi sekitar Rp.70/meter,

sedangkan harga tanah saat itu berkisar Rp.2.000/meter. Sudah bisa di tebak jika saat itu kemarahan pun meluap. Dan uang yang disodorkan di tolak mentah-mentah.

Penolakan yang di buat pemilik sah tanah berlokasi di sekitar Jalan Sungai Ogotion, ternyata tidak melunturkan niat pemda kala itu melakukan pembebasan. Lewat salah seorang adik kandung Nenek Hamuria kembali negosiasi pembayaran dilakukan. Armin Yaporante yang kala itu mewakili Agraria bahkan sempat mengeluarkan kalimat terima tidak terima ini uang tetap tanah itu menjadi milik pemda karena tanah dan langit itu milik negara.

Nyali Nenek Hamuria ternyata tidak kendor dengan ancaman petugas agraria. Dari kantor ke kantor bahkan klimaksnya sampai menghadap Gubernur Tambunan dengan bertelanjang kaki sudah dilakukannya. Tetapi hasilnya belum menunjukkan titik terang. Bahkan penghujung tahun 2002 lalu beberapa kali petugas kepolisian mendatangnya. Peristiwa Juli 2003 yang lebih menghebohkan mengingat sepasukan Perintis Polisi Resort Kota (POLRESTA) Palu dengan mobil gajahnya mendatangi lokasi milik Nenek Hamuria.

Tindakan tersebut justru hanya di sambutnya dengan sebaris kalimat "Le naeka Yaku nte Pulisi" (artinya: tidak takut saya dengan polisi-red). Ketika di tanya mengapa begitu berani dengan polisi atau aparat negara lainnya, dengan lantang ia menjawab, " Saya tidak mencuri. Yang saya perjuangkan adalah tanah saya. Mengapa mesti takut".

Jangan Sampai Jender Jadi Jengkel

**Rukmini Rizal
(32 thn)**

Perempuan satu ini tergolong pa-ling muda dari keempat tokoh kita, tetapi jangan tanya sepak terjangnya dalam urusan gerakan perempuan adat. Posisi sebagai Bendahara PKK Ngata (desa-red) Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Dong-gala di tahun 1996 menjadi titik awal pengenalannya dengan gerakan perempuan. Meskipun jauh dalam lubuk hati yang paling dalam agak gerah dengan konsep gerakan perempuan versi

negara.

Kegerahan seorang perempuan kelahiran dua puluh tiga maret tiga puluh dua tahun silam, semakin menjadi tatkala mengikuti Pelatihan Gender (baca : Gerakan Perempuan) yang diselenggarakan CARE (Sebuah LSM Internasional-red). Penge-
tahuan tentang bagaima-
mana sesungguhnya ge-
rakan perempuan mulai
ia ketahui sedikit demi
sedikit. Kegiatan yang
telah berlangsung tujuh
tahun lalu lantas men-
jadikan nama Rukmini
Paata Toheke-kelak ber-
ganti nama menjadi Ruk-
mini Rizal setelah diper-
sunting Rizal sebelas
tahun silam (1992)-mulai
diperhitungkan dalam

berbagai forum pertemuan. Tidak ke-
tinggalan andil Yayasan Tanah Merdeka
(YTM) yang memberikan wacana tersendiri
dalam membesarkannya. "Mereka (YTM-
red) hadir sekitar tahun seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan. Kehadiran mereka
untuk membuka wacana kepada Orang
Toro," kata Mini, sapaan akrabnya.

Ibu dari tiga orang anak, Ika, Fifi,
dan Alam, ternyata cukup gigih dalam mem-
perjuangkan keberadaan masyarakat adat
khususnya perempuan. Ruang gerak yang
awalnya hanya seputar kampung halaman
tercinta saat ini sudah semakin meluas
hingga ke kampung-kampung tetangga,
seperti Bolapapu, dan Matauwe. Serta tanpa
sadar telah menyebarkan virus gerakan
masyarakat adat di Kecamatan Kulawi.
Terbukti dengan mulai bermunculan
organisasi masyarakat adat, semisal Forum
Pemuda Adat di Ngata Toro.

Hal lain yang nyaris terlupakan
bahwa Mama Ika (panggilan lainnya-red)
adalah aktivis perempuan yang meng-
khususkan diri pada gerakan perempuan
adat pertama. Satu prestasi untuk itu telah
ditorehkannya dengan menjadi wakil
Masyarakat Adat Sulawesi-Tengah pada
Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama
di Jakarta (1999). Kehadirannya bukan
sebagai peserta golongan 4 D (datang,
duduk, dengar dan diam), tetapi justru

sempat memimpin jalannya kongres yang
diikuti tiga ratus lima puluh peserta.

Untuk beberapa saat gerakannya
(masyarakat adat-red) sedikit diperlambat,
berhubung kodratnya sebagai seorang ibu.
Dimana ia tengah menantikan putra
ketiganya.



Semangat yang dimiliki
Mini ternyata mendapat
dukungan sepenuhnya dari
sang suami. Kenyataan ini
bukan sekedar isapan jem-
pol belaka, nyaris berbagai
konsep pemikiran termasuk
kritik terbesar berasal da-
rinya (baca : Rizal). Hingga
tak mengherankan jika
sejumlah rekan aktivis LPA
AWAM GREEN pernah
mendapati keduanya te-
ngah asyik memperde-

batkan situasi politik di Kulawi hingga larut
malam. "Gila Mama Ika dan Papa Ika masih
baku bantah urusan pengangkatan camat,
padahal so tengah malam," tutur Mulianto
(Aktivis LPA AWAM GREEN) dengan nada
suara takjub. Pendapat senada pernah pula
dilontarkan seorang peneliti IPB yang akrab
di sapa Pak Bowo-saat itu Rizal tengah
melintasi ruang tamu dengan celana panjang
yang tergulung tak beraturan-dengan nada
suara rendah ia (Pak. Bowo) berkata, "Orang
itu pintar, sesungguhnya ia adalah otak
Rukmini yang sebenarnya".

Dukungan ini semakin nyata saat Se-
miloka Perempuan Ngata Toro berlangsung
Juni lalu. Ditengah teriknya matahari Toro,
ia rela bolak-balik dengan kendaraan roda
dua hanya untuk mengangkut berbagai
keperluan kegiatan. Termasuk jadi ojek
gratisan bagi sejumlah peserta. Siang itu
bahkan dengan tergopoh-gopoh ia me-
ngangkat sebuah dus besar yang berisikan
kotak makan siang.

Dan baru mengambil waktu ber-
istirahat jika semuanya tuntas. Namun
belum beberapa detik ia mengambil waktu
bersantai mendadak Mini mendekat meminta
tolong untuk mengambil sesuatu-sebenarnya
bisa dilakukan sendiri. "Heh ... Jangan
sampai urusan jender jadi jengkel. Istirahat
dulu saya sebentar," guraunya yang diikuti
tawa lebar orang disekitar mereka. *

Globalisasi Dan Nasib Masyarakat Adat

*Isu Masyarakat Adat Kini Telah Menjadi Isu Global
Dan Pertemuan Kelompok Kerja Masyarakat Adat Ke-XXI
Menjadi Ajang Pertarungan Antara Dua Global*

Kelompok Kerja Masyarakat Adat atau Working Group on Indigenous Population yang kelahirannya didasarkan atas Resolusi Dewan Ekonomi Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34 tahun 1982. Merupakan sub organ dari Sub Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Yang melangsungkan pertemuan tahunannya setiap akhir Juli di Jenewa (Swiss).

Kelompok Kerja memiliki dua agenda tetap, *pertama* untuk melihat kembali perkembangan terhadap Promosi dan Perlindungan Atas Hak Asasi dan Kemerdekaan Masyarakat Adat. Dan *kedua*, memberikan perhatian terhadap setiap perubahan standar internasional bagi masyarakat adat.

Keanggotaan kelompok ini sendiri terdiri atas Para Pakar yang independen serta wakil dari setiap belahan dunia. Keikutsertaan dalam pertemuan kelompok ini bersifat terbuka bagi setiap kelompok dan komunitas masyarakat adat. Kondisi demikian berlaku pula bagi wakil pemerintah, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga-lembaga yang termasuk dalam ruang lingkup Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki komitmen kuat terhadap persoalan masyarakat adat. Dan hingga kini kelompok ini tergolong sebagai forum terbesar yang dimiliki PBB khususnya dalam lapangan hak asasi manusia.

Dan dipenghujung bulan Juli 2003 (21-25) Kelompok Kerja kembali melangsungkan pertemuannya. Seperti tahun-tahun sebelumnya pertemuan kali ini berlangsung di Palais De Nation (Markas PBB) di Jenewa, Swis. Sekitar 600 peserta dari penjuru dunia menghadiri pertemuan akbar masyarakat adat. Tema yang di bahas untuk tahun ini mengenai Masyarakat Adat dan Globalisasi. Yang secara rinci terbagi ke dalam lima sub tema, *pertama* migrasi/urbanisasi, *kedua* komunikasi/teknologi dan kebudayaan, *ketiga* kemiskinan, *keempat* kebijakan pembangunan dan *kelima* perdagangan dan hak intelektual.

Diskusi panjang yang berlangsung selama lima hari-berlangsung sejak pukul sembilan pagi hingga pukul enam petang-teridentifikasi beberapa persoalan yang cukup mendasar. Diantaranya Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Masyarakat Adat, Pengolahan Sumber Daya Alam, Keberadaan Masyarakat Adat dalam Sudut Pandang Negara, Perang Antar Umat Beragama, Persamaan di Hadapan Hukum, Isu Pemuda Adat dan Campur Tangan Militer Dalam Setiap Konflik Masyarakat Adat.

Selanjutnya dari rangkaian persoalan dirangkum oleh para ahli yang independen, diantaranya Mr.Guisse, Mrs.Motoc, Mr.Yakota dan Mrs.Hamson. Salah satu tanggapan diantaranya berasal dari Mr.Yakota-satu-satunya pakar yang berasal dari Asia (Jepang)-memberikan rekomendasi agar setiap negara melalui Hukum Internasional mulai memperkenalkan masyarakat adat sebagai pemilik sumber daya alam. Sementara rekomendasi lainnya menghendaki pengawasan internasional terhadap setiap perusahaan besar baik berskala nasional maupun internasional yang mengolah sumber daya alam di tanah milik masyarakat adat.

Pada satu kesempatan di hari ketiga (23/07), Mrs.Victoria Corpuss, yang disapa Mrs.Vicky dari Tebteba International Foundation-sebuah lembaga swadaya masyarakat berskala internasional yang memiliki perhatian khusus terhadap segala isu masyarakat adat-asal Philipina, mengatakan, "Kelompok ini merupakan media bagi setiap orang maupun lembaga yang punya perhatian serius terhadap masyarakat adat. Dan tempat ini juga dapat menjadi ajang kampanye bagi persoalan mereka". Selanjutnya ia menambahkan kendala bahasa sebagaimana yang dihadapi hampir sebagian kelompok masyarakat adat atau pemerhatinya semisal di Sulawesi-Tengah dapat diatasi dengan mulai menterjemahkan setiap hasil pertemuan untuk seterusnya disosialisasikan kepada masyarakat, begitu pula sebaliknya.*

Petani Korban Banjir Duduki Tanah Eks Konsesi Babia

Banjir yang kerap mengunjungi warga Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi-Selatan setiap tahunnya membuat separuh penduduk harus rela meninggalkan kediamannya untuk sementara waktu. Bahkan menurut Irwan, seorang Warga Salunggadue, Desa Pasangkayu, menyebutkan bahwa dirinya pernah mengalami keadaan dimana banjir baru surut setelah enam bulan mengenangi desa.

Kondisi ini akhirnya memaksa sejumlah warga korban banjir untuk mencari lahan pemukiman baru. Lahan Eks Konsesi (tanah eks hak barat-red) Babia menjadi tanah harapan, sebab tidak ada tempat lain, demikian alasan kedua puluh lima kepala keluarga penghuni. Alasan tersebut juga dibenarkan sejumlah warga yang menetap di luar tanah eks konsesi. Sementara tidak diketahui dengan pasti siapa sesungguhnya pemegang hak.

Kehadiran penghuni baru di tanah tak bertuan itu, semenjak pertengahan Mei 2003 yang diikuti dengan pembangunan

tempat tinggal, ternyata mengusik ketenangan Tri Pimpinan Kecamatan (Tripika-red) Pasangkayu. Sehingga pada pertengahan Juni (18/06/03) atas inisiatif mereka (baca: Tripika) terjadilah pertemuan dengan warga Penghuni Lahan Eks Konsesi Babia yang berlangsung di Rumah Irwan.

Dalam pertemuan tersebut pihak pemerintah menghendaki tidak ada lagi pembangunan tambahan termasuk jumlah orang yang menghuni.

Pada kesempatan itu pun mereka (Tripika-red) mengisyaratkan bahwa sewaktu-waktu para penghuni lahan dapat saja dipindahkan. Karena berdasarkan Perundangan yang ada tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamuju Utara, tanah tersebut termasuk dalam areal pembangunan fasilitas perkantoran.

Kenyataan demikian ternyata dapat diterima dengan tulus oleh warga dusun. Tetapi dengan syarat mereka tidak dipindahkan keluar dari areal eks konsesi. "Sebab kami ingin hidup berkampung. Dan kami tidak mau lagi tinggal di tanah orang" tutur Eko, salah satu penghuni.



Sajak Para Lelaki Indonesia 2003

Oleh : Putu Pendit

Kepada anak-anak kami
Yang sudah lahir, sedang dalam kelahiran,
Maupun yang sedang menuju rahim isteri-isteri kami,
Maafkanlah Ayah-ayahmu
yang tak berdaya menahan si angkara
merajah negeri indah ini.
Ayah mohon ampun kepada kalian.
Ayah bersujud di kaki-kaki kecil kalian.
Maafkan.

Ayah berjanji dengan tangis mengambang di mata
tidak akan meracuni batin kalian
dengan kerakusan ketamakan ketidak pedulian

Ayah berjanji dengan dada sesak
tidak akan berhutang kepada negara penuh salju
sehingga kalian tidak perlu menanggung beban
membayar bunganya

Ayah berjanji dengan lutut gemetar
tidak akan berleha-leha melihat negeri ini runtuh
agar kalian punya tempat berteduh yang nyaman
tidak seperti saat kalian lahir
negeri ini sedang sekarat dan kotor
penuh muntah orang-orang yang rakus
penuh kotoran orang-orang yang culas

Ayah berjanji akan membersihkannya
walau cuma dengan doa
dan mungkin sedikit luka

Ayah bersujud dikaki-kakimu yang kecil
Anakku maafkan kami yang alpa
dan tak berdaya

Ayah akan buat sebuah biduk sederhana
terbuat dari cinta dan pandangan terbuka
untuk ananda berlayar ke mana suka
semoga Tuhan bersama Ananda
dan ayah pun tiada sudah
tidak ada artinya lagi.